Asketik: Jurnal Agama dan Perubahan Sosial
ISSN: 2615-4668 (Online) 2579-7050 (Printer)
V0l. 5, No. 2 (2021); pp. 175-204

# EVALUASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN PETERNAKAN SAPI PERAH DI KAMPUNG SUSU LAWU KELURAHAN SARANGAN KACAMATAN PLAOSAN KABUPATEN MAGETAN

**[*1] Nihayatus Sholichah, [*2] Charity Oktoliya**
[1] Fakultas Ilmu Administrasi , Universitas Dr. Soetomo Surabaya
*ninis.fadillah@gmail.com

**Artikel History**
*Submit:* 25 Februari 2021
*Review:* 29 Juli 2021
*Revised:*
24 September 2021
*Accepted:*
01 Desember 2021

**Abstract:** Community empowerment through the management of dairy cattle is one of the flagship programs of the Magetan Regency Government which aims to improving the economy of the people of Kampung Susu Lawu who incidentally are dairy farmers so that farmers can spread their wings in marketing the livestock products they have managed through this empowerment after that. This paper means to reveal and analyze data: 1) the process of community empowerment through the management of dairy farms in the Susu Lawu village, Sarangan sub-district, Plaosan sub-district, Magetan district, and 2) community empowerment evaluation through the management of dairy farms in the Susu Lawu village, Sarangan sub-district, Plaosan sub-district. magnet district. This paper was conducted using a qualitative case study approach. Data collection techniques used are: (1) observation, (2) interviews, and (3) documentation. This paper had result that indicate if: (1) The process of Community Empowerment through the management of dairy farms in the Susu Lawu Village, Sarangan Sub-district, Plaosan District, Magetan Regency is generally quite mature in terms of planning by selecting activities based on the priority needs of community groups. In general, its implementation can support the success of the Empowerment Program through the management of dairy farms and improve the community's economy. (2) Evaluation through the management of dairy farms in the Susu Lawu Village, Sarangan Sub-district, Plaosan District, Magetan Regency is quite successful in developing skills and increasing the income of community groups.

Keywords: Community Empowerment, Dairy Farm Management

## Pendahuluan

Virus corona sudah memberikan perubahan pada bermacam-macam segi kehidupan bermasyarakat termasuk pada negara Indonesia, bermula dari tingkatan nasional sampai dengan tingkat desa. Desa sendiri adalah sebagai gerbang depan untuk menyalurkan bantuan dari pemerintahan untuk masyarakat di desa ketika pandemic

berikut berlangsung, berdasarkan hal tersebut maka adanya pengalaman dari desa mampu menjadi sebuah studi pembelajaran untuk kita. Seperti yang kita ketahui di tanggal 31 Desember 2019, World Health Organization pada Negara China membuat sebuah laporan akan kasus pneumonia yang tak diketahui etiologi dari kasus itu sendiri pada Kota Wuhan, Provinsi Hubei China, dan di tanggul 7 Januari 2020, Cina memberikan identifikasi pneumonia yang tak diketahui etiologi dari hal itu sendiri selaku jenis baru corona virus, dan akhirnya do tanggal 30 Januari 2020 World Health Organization melakukan penetapan pada virus corona selaku kedaruratan kesehatan masyarakat yang menjadikan resah di seluruh belahan bumi. Pennambahan jumlah kasus virus corona terselanggara pada periode waktu yang cukup cepat serta telah tersebar antar negara mencakup pada negara Indonesia, di Indonesia kasus virus corona terus bertambah secara cepat dari suatu tempat kepada tempat lainnya yang menjadikan masyarakat harus membatasi aktivitas diluar rumah akibatnya penyebaran virus corona bisa memberikan penekanan pada tingkatan kesejahteraan warga desa seperti keluarga pelaku serta pekerja Usaha Kecil dan Menengah, serta pekerja yang bergaji rendah dalam usaha skala besar atau menengah kepada tingkatan yang lebih rendah, bahkan ke tingkat dibawah garis kemiskinan. Banyaknya keluarga yang hampir jatuh miskin, dan sangat miskin sebab pengaruh dari virus corona pada kegiatan operasional dari usaha kecil ataupun mikro, serta pekerja yang dirumahkan dalam bermacam-macam sektor ekonomi formal serta informal (Budastra, 2020:48-57).

Kemiskinan ialah sebuah permasalahan pada bidang sosial yang tak bisa terlepas dari kehidupan bangsa Indonesia. Kemiskinan menjadi sebuah permasalahan yang kronis yang memiliki keterkaitan pada permasalahan pengangguran serta kesenjangan sosial yang mampu memunculkan sebuah masalah sosial. Upaya guna menanggulangi permasalahan pada bidang kemiskinan ialah tugas dari pemerintah baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Maka dari persoalan tersebut, diperlukan terdapatnya seluruh pihak yang mendukung ketika memberjalankan program penanggulangan kemiskinan. Program-program penanggulangan kemiskinan itu sendiri sudah dilakukan pengaturannya pada PerDa Kota Magetan No. 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Magetan. Berdasarkan Laporan Bappeda Kota Magetan tentang Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Magetan Pemerintah Kota Magetan melakukan upaya untuk mempercepat upaya untuk menanggulangi kemiskinan menengok tinggi angka kemiskinan pada Kota Magetan. Di tahun 2018 – sekarang Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan sudah memberjalankan program pelatihan keterampilan

bagi masyarakat miskin pada Dusun Singolangu atau sekarang disebut dengan Kampung Susu Lawu itu sendiri. Ketika melaksanakan program itu sendiri tak seluruh warga menghadiri penyelenggaraan program sebab profesi masyarakat dominan pada profesi itu petani dan buruh tani namun sebagian masyarakatnya juga berprofesi sebagai peternak sapi perah. Berdasarkan hal tersebut menjadikan pola pikir warga yang miskin yang tak turut serta pada program untuk menanggulangi kemiskinan itu sendiri implikasi dari program itu kurang mempengaruhi ketika memberikan solusi agar masyarakat terbebas dari kemiskinan. Selain hal tersebut, masyarakat miskin pada Dusun Singolangu mempunyai tingkatan pendidikan masihlah rendah. Modal berapapun besarnya dapat habis sebab masyarakat tak pintar untuk melakukan pengelolaan akan keuangan. Begitupun pada program yang sudah dilakukan pada Kampung Susu Lawu aktivitas yang sudah dilakukan tak terdapat sebuah sinkronisasi di antaranya terdapat pada aktivitas untuk mengolah makanan dimana terdapat masyarakat miskin yang memperoleh bantuan tak diberi suatu pelatihan guna melakukan pemasaran ataupun promosi pada produknya. Di samping hal tersebut produk yang dibuat oleh masyarakat tak memiliki sebuah merek dagang. Ketidak mampuan melakukan persaingan menggunakan produk yang sudah semenjak lama teredar di masyarakat dikarenakan pangsa pasar yang belumlah kuat. Di samping hal tersebut, masyarakat pun belumlah mengetahui bagaimanakah metode guna mengembangkan produknya. Masyarakat miskin belumlah sanggup melakukan inovasi pada produk yang sudah dibuat.

Evaluasi ialah sebuah usaha guna melakukan penentuan akan manfaat ataupun kegunaan sosial dari sebuah kebijakan ataupun program. Maka dari hal tersebut, ketepatan tujuan serta target dari sebuah kebijakan bisa selalu dipertanyakan, sehingga kegiatan mengevaluasi pun berkenaan bersama prosedur guna memberikan evaluasi tujuan serta target kebijakan. Kedua, interdependensi fakta-nilai. Tuntutan evaluasi bergantung pada fakta dan nilai. Guna memastikan bahwasanya kebijakan ataupun program sudah meraih kinerja yang paling tinggi, dibutuhkan tak hanya hasil-hasil kebijakan berharga untuk beberapa individu, kelompok, ataupun masyarakat; tetapi juga hendaknya ditunjang oleh sejumlah bukti bahwasanya dengan aktual ialah sebuah konsekuensi dari aksi yang dilaksanakan guna melakukan pemacahan akan permasalahan tertentu. Ketiga, orientasi saat ini juga masa lalu..

Tuntutan evaluatif memiliki perbedaan jika dilakukan perbandingannya bersama tuntutan advokatif. Evaluasi lebih ditujukan kepada hasil saat ini serta pada masa lalu

daripada hasil di masa mendatang. Evaluasi memiliki sifat yang retrospektif serta sesudah aktivitas ataupun kegiatan tersebut dilaksanakan. Keempat, dualitas nilai. Nilai-nilai yang menjadi dasar dari tuntutan evaluasi memiliki kualitas ganda. Nilai dianggap memiliki tujuan sekaligus metodenya. Dalam hal ini, evaluasi serupa bersama rekomendasi sejauh berkaitan bersama nilai yang terdapat bisa dirasa selaku sesuatu yang intrinsik ataupun ekstrinsik. Nilainilai dilakukan penataannya pada sebuah hierarki yang melakukan refleksi akan kepentingan relatifdan saling bergantung antara tujuandan sasaran.

Fungsi evaluasi kebijakan publik berdasar dari opini Dwijowijoto (2011: 463) mempunyai 4 fungsi, ialah "eksplanasi, kepatuhan, audit, dan akunting". Dengan melaksanakan upaya mengevaluasi bisa digambarkan sebuah realita penyelenggaraan program serta generalisasi mengenai pola-pola hubungan antar-berbagai dimensi realitas yang dilakukan pengamarannya. (1) Eksplanasi, evaluator mampu memberikan indetifikasi akan permasalahan, keadaan, serta aktor yang menunjang kesuksesan maupun gagalnya dari sebuah kebijakan; (2) Kepatuhan, dengan melaksanakan upaya mengevaluasi bisa mengerti apa tindakan para pelaku, baik birokrasi ataupun pelaku yang lain, disesuaikan bersama standar prosedur yang dilakukan penetapannya oleh kebijakan; (3) Audit, dengan melaksanakan upaya mengevaluasi bisa mengerti, apa output sungguh-sungguh tersampaikan pada kelompok saran kebijakan, ataupun terdapat sebuah penyimpangan maupun kebocoran; (4) Akunting, dengan melaksanakan upaya mengevaluasi bisa mengerti apakah akibat ekonomi dari kebijakan itu sendiri.

Evaluasi kinerja kebijakan dilaksanakan guna memberikan penilaian akan hasil yang diraih oleh sebuah kebijakan sesudah kebijakan tersebut dilaksanakan penyelenggaraannya. Hasil yang diraih bisa dilakukan pengukurannya pada ukuran jangka pendek ataupun output, jangka panjang ataupun out come. Evaluasi kinerja kebijakan melalui melaksanakan penilaian komprehensif pada:

1) Mencapai target (output)
2) Mencapai tujuan kebijakan (outcome)
3) Kesenjangan (gap) antar target serta tujuan bersama pencapaian
4) Perbandingan (benchmarking) menggunakan kebijakan yang serupa pada lokasi lainnya yang sukses menerapkan kebijakan tersebut.

5) Identifikasi faktor penunjang kesuksesan ataupun ketidakberhasilan yang menjadi penyebab adanya kesenjangan, serta memberi rekomendasi guna memberikan penanggulangan akan kesenjangan.

Tiga fungsi itu sendiri memperlihatkan sebuah peran penting dari mengevaluasi suatu kebijakan yang dilaksanakan supaya tahapan kebijakan dengan menyeluruh bisa terlaksana dengan baik. Berdasar dari Lester & Stewart dalam Winarno (2008: 227), evaluasi kebijakan bisa dilakukan pembedaannya pada 2 dua tugas yang tidak sama. Tugas pertama ialah guna melakukan penentuan akan konsekuensi-konsekuensi apakah yang diciptakan oleh sebuah kebijakan melalui metode memberikan gambaran pada dampak. Sementara itu, tugas kedua ialah guna memberikan penilaian akan kesuksesan ataupun gagalnya sebuah kebijakan menurut standar ataupun kriteria yang sudah ditentukan terdahulu.

Tugas pertama tertuju dalam usaha guna mengamati apa program kebijakan publik meraih tujuan ataupun pengaruh yang dikehendaki maupun tak dikehendaki. Jika tidak, faktor apakah yang mempengaruhinya. Contohnya, apa disebabkan adanya kasalahan ketika melakukan perumusan akan permasalahan ataupun disebabkan oleh beberapa faktor lainnya. Tugas kedua pada evaluasi kebijakan secara mendasar memiliki keterkaitan yang sangat rekat bersama tugas pertama. Sesudah diketahu beberapa konsekuensi dari adanya kebijakan dengan menggambarkan pengaruh dari kebijakan publik, kemudian dapat diketahui apa program kebijakan yang diselenggarakan sesuai ataupun tak sesuai pada pengaruh yang dikehendaki. Berdasarkan hal tersebut dapat dinilai apa program yang dilaksanakan mengalami kesuksesan ataupun kegagalan. Melalui hal tersebut, tugas kedua pada kegiatan mengevaluasi kebijakan yakni memberikan penilaian apa sebuah kebijakan sukses ataupun gagal ketika mencapai pengaruh yang dikehendaki. Berdasarkan dua persoalan yang dijabarkan, kemudian bisa menyimpulkan tentang makna penting dari kegiatan mengevaluasi pada kebijakan publik. Pengetahuan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan gagalnya sebuah kebijakan untuk mencapai pengaruh yang dikehendaki bisa menjadi pedoman guna melakukan perubahan ataupun memberikan perbaikan pada kebijakan pada masa mendatang. Ada berbagai alasan guna memberikan jawaban kenapa diperlukan adanya aktivitas mengevaluasi kebijakan. Alasan itu sendiri bisa digolongkan jadi 2 dimensi, internal serta eksternal. Yang memiliki sifat internal, di antaranya:

1) Guna tahu akan kesuksesan dari sebuah kebijakan. Melalui terdapatnya evaluasi kebijakan bisa ditemui sebuah informasi apa sebuah kebijakan berhasil maupun tak berhasil.

2) Guna tahu akan tingkat keefektivitasan dari sebuah kebijakan. Aktivitas mengevaluasi suatu kebijakan bisa menilai apa sebuah kebijakan meraih tujuan ataupun kebalikannya.

3) Guna memberikan jaminan akan menghindari mengulangi kesalahan (guarantee to non recurrence). Informasi yang mencukupi mengenai nilai suatu hasil kebijakan secara otomatis dapat memberi rambu supaya tak mengulang kesalahan yang serupa pada proses mengimplementasikan kebijakan yang sama ataupun kebijakan lainnya di masa mendatang.

Sementara itu, alasan yang mempunyai sifat eksternal setidaknya bagi 2 kepentingan:

1) Guna memberikan pemenuhan akan prinsip akuntabilitas publik. Aktivitas penilaian pada kinerja kebijakan yang sudah dilakukan pengambilannya ialan satu di antara beberapa wujud dari pertanggungjawaban pembuat kebijakan pada publik, baik yang berkaitan dengan langsung ataupun tak langsung menggunakan implementasi tindakan kebijakan.

2) Guna mengsosialisasikan manfaat dari adanya suatu kebijakan. Melalui terdapatnya aktivitas mengevaluasi kebijakan, masyarakat luas, terkhusus kelompok sasaran serta penerima, bisa tahu akan manfaat dar adanya suatu kebijakan dengan lebih terukur.

William N. Dunn (2003: 609) mencetuskan kriteria-kriteria rekomendasi kebijakan yang serupa bersama kriteria evaluasi kebijakan, kriteria rekomendasi kebijakan meliputi:

1) Efektifitas (effectiveness). Berkaitan bersama apa sebuah alternatif meraih hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektifitas, yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneternya.

2) Efisiensi (efficiency). Berkaitan bersama jumlah usaha yang digunakan menghasilkan tingkat efektifitas tertentu.Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi adalah merupakan hubungan antara efektifitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter.

3) Kecukupan (adequacy). Berkaitan bersama seberapakah jauhnya sebuah tingkatan keefektifitasan memberikan pemuasan akan kebutuhan, nilai, ataupun peluang terciptaknya sebuah permasalahan. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan.

4) Perataan (equity). Berkaitan bersama rasionalitas legal serta sosial juga mengarah pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam

masyarakat. kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya (misalnya, unit pelayanan atau manfaat moneter) atau usaha (misalnya biaya moneter) secara adil didistribusikan. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan pendidikan kadang-kadang didistribusikan atas dasar kriteria kesamaan. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitukeadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan risoris masyarakat.

5) Responsivitas (responsiveness) berkaitan bersama seberapakah jauhnya sebuah kebijakan mampu memberikan kepuasan akan kebutuhan, preferensi, ataupun nilai dari kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Karakteristik responsivitas memiliki peran penting sebab analisis yang bisa memberikan kepuasan pada seluruh kriteria yang lain seperti efektifitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan masihlah mengalami kegagalan apabila belumlah memenuhi kebutuhan aktual dari kelompok yang seharusnya memperoleh keuntungan yang disebabkan oleh keberadaan dari sebuah kebijakan.

6) Ketepatan (appropriateness). Kriterian ketepatan dengan dekat memiliki hubungan bersama rasionalitas, substantif, sebab pertanyaan mengenai ketepatan kebijakan tak berkenaan bersama satuan kriteria perorangan namun 2 ataupun lebih karakteristik dengan bersama-sama. Ketepatan tertuju kepada nilai ataupun harga dari tujuan program serta pada kekuatan atas asumsi yang menjadi landasan dari beberapa tujuan itu sendiri.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan dengan memiliki tahpan-tahapan serta berkesinambungan sudah sukses dalam memberikan perbaikan pada keadaan perekonomian baik pada skala regional atau kerjasama antara suatu daerah dengan daerah lain maupun nasional atau kerjasama ditingkat nasional. Perbaikan keadaan perekonomian itu sendiri bisa dijalani melalui melakukan pemanfaatan pada SDA ataupun SDM. SDM ialah persoalan yang penting pada pembangunan, sebab SDM yang rendah membuat keadaan masyarakat kurang sanggup untuk mengamati dan juga memberikan solusi pada permasalan pada kehidupan yang selanjutnya dapat membuat sebuah dampak kepada bidang pengangguran, maka berdasar dari hal tersebut, pengembangan ataupun pemberdayaan manusia ialah persoalan yang wajibs erta hendaknya dilaksanakan.

Pembangunan ialah sebuah serangkaian usaha memberikan perwujudan akan pertumbuhan serta perubahan dengan terencana serta sadar yang ditempuh oleh sebuah negara bangsa menuju ke modernitas dengan tujuan membina bangsa. Serta pada

bermacam-macam bidang mencakup pembangunan pada bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan juga pertahanan serta keamanan. Pada keterkaitannya bersama pembangunan ekonomi, dalam era otonomi daerah layaknya sekarang, melakukan perwujudan pada pembangunan nasional kepada bidang ekonomi tak hanya menjadi pertanggungjawaban dari pemerintahan pusat namun juga daerah, persoalan berikut menjadi akibat terdapatnya desentralisasi yang menjadikannya menuntut kepada pemerintahan pusat memberi sebagian wewenang pada Pemerintahan daerah ketika melakukan pengaturan serta pembangunan pada potensi setiap daerah.

Akan tetapi pemerintahan daerah belumlah dengan optimal melakukan usaha guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Pembangunan ekonomi sebuah daerah hendaknya dilakukan perencanaan dengan matang serta optimal bersama beberapa program yang bisa dipakai guna mencepatkan pertumbuhan ekonomi. Yang menjadikannya disesuaikan bersama tujuan pembangunan daerah yaitu guna memberikan kesejahteraan pada masyarakat. Pembangunan yang dilakukan tak hanya bertujuan guna melakukan pengejaran pada pertumbuhan ekonomi akan tetapi pun hendaknya ditujukan supaya perkembangan itu sendiri bisa diperoleh hasil dengan lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bukan perencanaan dari sebuah daerah, namun perencanaan bagi sebuah daerah. Perencanaan pembangunan ekonomi daerah bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan berbagai sumber daya publik yang tersedia di daerah tersebut dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta secara bertanggung jawab.

Melalui perencanaan pembangunan ekonomi daerah, suatu daerah dilihat secara keseluruhan sebagai suatu unit ekonomi (economic entity) yang didalamnya terdapat berbagai unsur yang berinteraksi satu sama lain. (Kuncoro, 2004:46). dan diperlukan berbagai upaya inovatif dan kreatif oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakatnya. Diantara yang dapat dilakukan, yaitu dengan program pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah. Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto (2007:74) menjelaskan, konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian community development (pembangunan masyarakat) dan community-based development (pembangunan yang bertumpu pada masyarakat).

Masalah pembangunan merupakan masalah yang kompleks atau sering terjadi, seperti masalah perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang selalu terjadi saat menjalankan sebuah organisasi. Dan pembangunan juga memiliki banyak aspek misalnya aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan. Pada masa orde baru

pembangunan masyarakat dilakukan dengan menggunakan program dari negara yang di fokuskan atau di sentralkan. Dimana pembangunan masyarakat dilakukan oleh pihak pemerintah sendiri baik dengan dukungan dalam negeri (kemampuan) maupun dukungan dari negara - negara maju ataupun organisasi internasional.

Pengentasan kemiskinan hakikatnya adalah mengubah perilaku yang dimulai dari mengubah mindset individu dan masyarakat. Pengetasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui upaya pemberdayaan masyarakat karena masyarakat didorong untuk memiliki kemampuan sesuai potensi dan kebutuhannya untuk berdiri tegak diatas kakinya sendiri, memiliki daya saing, serta mandiri melalui berbagai kegiatan pemberdayaan.

Untuk itu pemberdayaan tidak lepas dari beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat oleh karena itu pemerintah harus benar-benar mempersiapkan dengan matang semua kegiatan pemberdayaan masyarakat sebelum dimulai.

Menurut Chambers dalam (Kartasasmita, 1996:142) Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people centred, participatory, empowering, and sustainable". Lebih jauh Chambers menjelaskan bahwa konsep pembangunan dengan model pemberdayaan masyarakat tidak semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (basic need) masyarakat saja tetapi lebih sebagai upaya mencari alternative pertumbuhan ekomoni lokal.

Menurut Kuncoro (2004:38) "Dengan otonomi daerah, ada tendensi masing-masing daerah mementingkan daerahnya sendiri dan bahkan bersaing satu sama lain dalam berbagai hal, terutama mengumpulkan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Otonomi kemudian diidentikkan dengan automoney. Artinya, otonomi diterjemahkan semata-mata dari upaya meningkatkan proporsi PAD terhadap APBD. Dalam praktek, otonomi berarti upaya penggalakan, penggalangan, dan intensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dengan cara apapun.

Alasan memilih Kabupaten Magetan sebagai lokasi penelitian karena Kabupaten Magetan adalah salah satu kabupaten di Indonesia yang banyak memiliki sumber daya yang cukup melimpah. Kabupaten Magetan mempunyai 19 kecamtan yang terdiri dari 208 desa dan 27 kelurahan. Dengan ibu kota Kabupaten. yang terletak di kecamatan Magetan. Secara geografis kabupaten Magetan terletak di bagian Barat Provinsi Jawa Timur. Bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Ngawi., bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah), bagian barat berbatasan dengan

Kabupaten Karanganyar (Jawa Tengah), bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Magetan pada tahun 2018 mencapai 64,860 jiwa. Dari data tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk miskin di kabupaten Magetan masih dalam tingkatan yang tinggi, maka dalam desa Magetan dapat juga menerapkan program dari pemerintah. Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat maka akan dapat mengurangi kemiskinan terutama pada pedesaan. Pemberdayaan masyarakat merupakan program yang dapat dibuat pemerintah untuk bisa membangun suatu daerah dan mensejahterakan masyarakatnya. Pemberdayaan suatu daerah bisa di lakukan dengan memfasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro kecil dan Menengah di perdesaan, meningkatkan juga partisipasi masyarakat guna membangun desa,dll.

Magetan juga memiliki banyak potensi alam yang belum diketahui masyarakat luas khususnya masyarakat pedesaan. Salah satu kawasan yang mempunyai potensi dan dapat dikembangkan menjadi kawasan wira usaha yaitu masyarakat di dusun singolangu atau sekarang lebih dikenal dengan kampung susu lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan. Dusun ini memiliki potensi yaitu sebagai tempat yang menghasilkan banyak sekali sumber daya alam yaitu sayur-sayuran san sebagainya. Namun yang menarik dari dusun ini yaitu mayoritas penduduknya menekuni bidang peternakan sapi perah yang selanjutnya di produksi dalam berbagai macam olahan susu, misalnya permen susu.

Potensi kampung susu ini dapat dilihat dari segi fisik dan non fisik. Potensi fisik meliputi, tanah, air, iklim, flora, dan fauna. Potensi non fisik pada kampung susu ini adalah lembaga-lembaga sosial desa dan aparatur desa, begitu banyak potensi di kampung susu dusun singolangu ini. Potensi tersebut dapat di kembangkan untuk menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya dengan mengembangkan potensi peternakan yang ada di kampung susu lawu tersebut dan potensi lainnya.

Pembangunan ekonomi masyarakat kabupaten Magetan terkait dengan pengelolaan peternakan sapi perah, diharapkan pembangunan sektor usaha ini menunjukkan adanya peningkatan dari jumlah unit usaha, tenaga kerja dan nilai investasi. Peningkatan jumlah usaha ini dibarengi dengan perhatian dan pembinaan yang cukup dari pemerintah kabupaten terkait dengan peningkatan kemampuan sumber daya manusianya maupun kemampuan pendanaan usahanya.

Penelitian ini di fokuskan kedalam Evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di kampung susu lawu. Karena ingin mengetahui bagaimana tindakan pemerintah serta bagaimana evaluasi terhadap program ini selain itu

warga dusun Singolangu banyak bermata pencaharian sebagai petani dan peternak sapi perah, disini pemerintah lebih bisa meningkatkan kualitas penduduk/warga dusun singolangu melalui pemberdayaan pengelolaan peternakan. Sehingga dari pemberdayaan tersebut bisa menghasilkan skill atau keterampilan baru serta bisa memperluas pengetahuan para peternak sapi perah agar kualitas susu dari perternakan tersebut bagus. Selain itu agar Kampung Susu Lawu bisa menjadi tempat wisata pendamping dari wisata Telaga Sarangan yang letaknya tidak jauh dari lokasi Kampung Susu Lawu. Konsep pembedayaan hampir menjadi agenda kerja tiap pemerintahan. Baik dari pemerintahan pusat ataupun pemerintahan desa yang memberikan naungan pada satuan kerja masyarakat paling kecil. Adanya konsep pemberdayaan berkaitan dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, berkaitan dengan dengan hal tersebut maka pemerintah dikeluarkan sebagai umpan untuk mensejahterakan masyarakat. Maka dari konsep yang ditawarkan masyarakat mampu mandiri serta menyesuaikan dengan potensi yang dipunya oleh masyarakat.

## Metodologi

Penelitian berikut menerapkan metode kualitatif "dalam penelitiannya. Adapun alasan kenapa dipilih metode kualitatif adalah, karena masalah penelitian ini masih belum jelas atau atau belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan eksplorasi terhadap objek penelitian. Dengan memfokuskan pada tujuan mengenai yakni mafaat, serta faktor yang mempengaruhi dari objek penelitian, dimana objek dari penelitian ini adalah Pemberdayaan Masyarakat."

Berdasarkan hal tersebut, tentu kurang pas jika diterapkan pada metode kuantitatif yang mana lebih menekan pada pembuktian hipotesis dengan menggambarkan fenomena melalui angka dan statistika. Penelitian ini menetapkan posisinya untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehemsif yang dilakukan pada situasi sosial (social situation) yang mana melibatkan tempat, pelaku, dan aktivitas (place, actor, activities) yang berinteraksi secara sinergis dari objek penelitian. Sehingga akan ditemukan data yang murni dari apa yang terjadi dilapangan.

Fokus kajian penelitian adalah Bagaimana pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan. Serta Bagaimana evaluasi terhadap Program

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan. Pada fokus tersebut akan diteliti menggunakan teori William N. Dunn yang memiliki enam variabel yaitu Efisiensi, Efektifitas, Kecukupan, Pemerataan, Responsitivitas, dan yang terakhir adalah Ketepatan. Alasan peneliti menggunakan teori ini adalah karena teori tersebut relevan dengan variabel yang dipakai serta permasalahan yang ada dari sasaran penelitian ini. digunakan. Teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik Wawancara, Teknik Dokumentasi dan Teknik Observasi.

## Hasil Penelitian

### *Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik*

Dalam Studi analisis kebijakan publik, maka salah satu cabang bidang kajiannya adalah Evaluasi Kebijakan. Mengapa Evaluasi Kebijakan dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (public policy) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Menurut Anderson dalam Winarno (2008:166), secara umum evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Sedangkan implementasi yangtidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan kependudukan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki. Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya: pelaksanaannya jelek (bad execution), kebijakannya sendiri itu memang jelek (bad policy) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (bad luck). Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada "implementasi kebijakan".

Menurut Lester dan Stewart (Winarno, 2008:166) evaluasi kebijakan dapat dibedakan ke dalam dua tugas yang berbeda, tugas pertama adalah untuk menentukan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dengan cara menggambarkan dampaknya. Sedangkan tugas kedua adalah untuk menilai keberhasilan atau kegagalan dari suatu kebijakan berdasarkan standar atau kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.

Evaluasi kebijakan merupakan persoalan fakta yang berupa pengukuran serta penilaian baik terhadap tahap implementasi kebijakannya maupun terhadap hasil (outcome) atau dampak (impact) dari bekerjanya suatu kebijakan atau program tertentu, sehingga menentukan langkah yang dapat diambil dimasa yang akan datang. Sinyal tersebut lebih diperjelas oleh Dolbeare (1975: 95) dijelaskan bahwa: "Policy impact analysis entails an extension of this research area while, atthe same time, shifting attention toward the measurment of the consequencesof public policy. In other words, as opposed to the study of what policycauses". Dengan demikian yang didefinisikan oleh Dye (1981: 366), secara singkat analisis dampak kebijakan "menggaris bawahi" pada masalah what policy causes sebagai lawan dari kajian what causes policy.

Konsep evaluasi dampak yang mempunyai arti sama dengan konsep kebijakan. "Policy evaluation is learning about the consequences of public policy". Adapun definisi yang lebih kompleks oleh Wholey dalam Dye(1981: 366) adalah sebagai berikut: "Policy evaluation is the assesment of the overall effectiveness of a nationalprogram in meeting its objectives, or assesment of the relative effectivenessof two or more programs in meeting common objectives" Evaluasi Kebijakan adalah merupakan suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah. Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara "policy impact/outcome dan policy output. "Policy Impact/outcome" adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan melalui pelaksanaan sebuah kebijakan.

### *Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan*

James Anderson dalam Winarno (2008: 229) membagi evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi, sebagai berikut:"

a. Tipe Pertama Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.
b. Tipe Kedua Merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe Ketiga Tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

Berdasarkan ketiga tipe tersebut yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe yang ketiga, yakni tipe evaluasi kebijakan sistematis, di mana peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah dengan cara melihat hasil pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2015 Menurut Edi Suharto (2012:61), tujuan kebijakan publik sosial, dalam konteks pembangunan sosial, kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menterjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Kebijakan sosial selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan sosial. Tujuan sosial ini mengandung dua pengertian yang saling terkait, yakni memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Edi Suharto (2012: 86), model-mod dalam analisis kebijakan publik adalah:

a. Model Prospektif ialah wujud kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif .
b. Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampakdampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan.
c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensikonsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan Berdasarkan pada ketiga tipe evaluasi kebijakan diatas maka nantinya peneliti akan mengevaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan.

### *Dimensi Evaluasi Kebijakan*

Dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi dan semuanya harus diperhatikan dalam membicarakan evaluasi. Menurut Winarno (2002: 171- 174) setidaknya

ada lima dimensi yang harus dibahas dalam meperhitungkan dampak dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi:

a. Dampak kebijakan pada masalah-masalah publik dan dampak kebijakan pada orang-orang yang terlibat
b. Kebijakan mungkin mempunyai dampak pada keadaankeadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan
c. Kebijakan mungkin akan mempunyai dampak pada keadaankeadaan sekarang dan yang akan datang
d. Evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai programprogram kebijakan publik
e. Biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.

Evaluasi kebijakan sebagai aktivitas fungsional, sama tuanya dengan kebijakan itu sendiri. Pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi dampak kebijakan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

a. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan informasi yang valid tentang kinerja kebijakan. Evaluasi dalam hal ini berfungsi untuk menilai aspek instrumen (cara pelaksanaan) kebijakan dan menilai hasil dari penggunaan instrumen tersebut.
b. Evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepastian tujuan atau target dengan masalah dihadapi. Pada fungsi ini evaluasi kebijakan memfokuskan diri pada substansi dari kebijakan publik yang ada. Dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan publik dibuat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hal yang seringkali terjadi adalah tujuan tercapai tapi masalah tidak terselesaikan.
c. Evaluasi kebijakan berusaha untuk memberi sumbangan pada evaluasi kebijakan lain terutama dari segi metodologi. Artinya, evaluasi kebijakandiupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi.

Evaluasi kebijakan secara sederhana menurut William Dunn dalam Agustino (2008:187), berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai atau manfaat-manfaat kebijakan hasil kebijakan. Ketika ia bernilai bermanfaat bagi penilaian atas penyelesaian masalah, maka hasil tersebut member sumbangan pada tujuan dan sasaran bagi evaluator, secara khusus, dan pengguna lainnya secara umum. Hal ini dikatakan bermanfaat apabila fungsi evaluasi kebijakan memang terpenuhi dengan baik. Salah satu

fungsi evaluasi kebijakan adalah harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan.

***Pemberdayaan Masyarakat***

Pemberdayaan menurut Webster dalam Oxford English Dictionary (Sedarmayanti, 2000: 78) adalah terjemahan dari kata empowerment yang mengandung dua pengertian: (1) to give power to (memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain), (2) to give ability, to enable (usaha untuk memberi kemampuan). Pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdaya di suatu kondisi atau keadaan yang mendukung adanya kekuatan atau kemampuan. Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh suatu masyarakat sehingga mereka dapat mengaktualisasikan jati diri, hasrat, dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri.

a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan orang - orang yang kurang beruntung.
b. Pemberdayaan adalah sebuah proses dimana manusia menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagi pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial.
d. Pemberdayaan adalah suatu cara dimana masyarakat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (berkuasa) atas kehidupannya.

Menurut Eddy Papilaya yang dikutip oleh Zubaedi (2007:42) Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan yang nyata.

Menurut Widjaja (2002:77) pemberdayaan masyarakat adalah pemberian wewenang pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejajaran bawah yang intinya pemberdayaan upaya membnagkitkan segala kemampuan yang ada untuk mencapai tujuan dan pemberdayaan diadakan agar daerah semakin mampu serta

mandirian, maksudnya mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menunjukkan ciri sebagai masyarakat serta membangun kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Menurut Soeharto (2006:76) pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untk memandirikan masyarakat serta potensi kemampuan yang mereka memiliki. Adapun pemberdyaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang sering terkait yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayaakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya meningkatkan kemampuan dan potennsi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati dirinya, serta mengangkat harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangankan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja.2003:169).

Menurut Eko (2004:11) Pemberdayaan merupakan sebuah gerakan dan proses berkelanjutan untuk membangkitkan potensi, memperkuat partisipasi, membangun peradaban dan kemandirian masyarakat. Menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilku, kemampuan dan kesadaran masyarakat. Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa yang menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelkasanaan pembangnan didesa ditunjukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapam kebijakan dan program serta kegiatan yang sesuai dengan esensi dan perioritas kebututuhan masyarakat.

Dari beberapa defenisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkat kemampuan dan kopetensi yang dimiliki oleh masyarakat sehingga masyarakat berkemmpuan dan berkekuatan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya memandirikan masyarakat melalui perwujudan potensi kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan demikian pada setiap upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah harus dipandang sebagai sebuah pemacu untuk meenggerakan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemnberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam semua aspek seehingga mampu menciptakaan masyarakat yang mandiri terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan sehingga yang demikian dapat mengembangkan kehidupan masyarakat.

Menurut Soeharto (2006:61) peran program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan melalui bantuan dana yang dapat diciptakan dari kegiatan social ekonomi harus menganut beberapa prinsip sebagai berikut :

1. Mudah diterima dan didayagunakan oleh masyarakat kelompok sasaran (acceptable).
2. Dikelola oleh masyarakat secaraterbuka dan dapat dipertanggung jawabkan (accountable).
3. Memberikankan pendapatan yang memadai dan mendidik masyarakat untuk mengelola kegiatan secara ekonomis (profitable).
4. Hasilnya dapat dilestarikan oleh masyarakat (sustainbele).
5. Pengelola dan dan pelestarian hasil dapat dengan mudah dan digulirkan dan dikembangkan oleh masyarakat dalam lingkup yang lebih luas.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise dalam (Sutrisno,2005:18) ada lima macam yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (button up approach) pada kondisi ini pengelola dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (participation): dimana setiap actor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep berkelanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonom.
4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal,ragionaldan nasional.

Oleh karena itu agar dapat memahami secara mendalam pengertian pemberdayaan maka perlu mengkaji beberapa pendapat dari ilmuan, salah satu diantaranya adalah menurut Mubarak (2010:34) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggungjawabnya selaku aggota masyarakat. Lalu pada pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses

pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggungjawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya (Soetomo,2006).

### *Proses Pemberdayaan Masyarakat*

Menurut Suharto (2005:60) Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Cara-cara Motivasi, Pelatihan, Pembinaan dan evaluasi:

1. Cara melakukan Motivasi

   Motivasi dapat ditimbulkan dengan cara membuat rancangan kerja yang memungkinkan seorang pegawai bersedia melakukan ke arah itu. Maka dari itu rancangan kerja harus memuat simpilkasi, standarisasi, dan spesialisasi.Rancangan pegawai memiliki ciri-ciri tersebut bisa meningkatkan motivasi pegawai.Berdasarkan keterangan diatas dapat dipahami bahwa motivasi bisa ditimbulkan melalui rancangan kerja. Ciri-ciri rancangan kerja yang baik adalah yang bersifat simplikasi maksudnya adalah rancangan kerja harus mempunyai nilai pelaksanaan (implikasi) yang mendekati keadaan kerja yang sebenarnya. Rancangan kerja juga harus mempunyai standarisasi, maksudnya ada nilai standar yang ditetapkan.
2. Cara - cara melakukan pelatihan dan pembinaan

   Program latihan mempunyai 3 tahapan yaitu:

   a. Penilaian kebutuhan pelatihan (need assesment), yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi agar bisa menentukan dibutuhkannya atau tidak program pelatihan.
   b. Pengembangan program pelatihan (development), memiliki tujuan untuk merancang lingkungan pelatihan dan metode - metode pelatihan yang dibutuhkan agar bisa mencapai tujuan pelatihan
   c. Evaluasi program pelatihan (evalution), yang tujuannya untuk menguji dan menilai apakah program-program pelatihan yang telah dijalani secara efektif mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

### *Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat*

Pelaksanaan Program Pemberdayaan merupakan serangkaian perencanaan yang sudah dirancang masyarakat dan pemerintah terkait yang diawali dengan seleksi lokasi/wilayah kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat dilanjutkan dengan proses pemberdayaan masyarakat dan akan di akhiri dengan kemandirian masyarakat dalam tahap pelaksanaan progran ini sangat diuntungkan karna dari pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan memberikan fasilitas yang cukup memadai bagi para peternak sapi perah di kampung susu lawu ini. Selain itu masyarakat sendiri juga bisa lebih memahami dan mengerti bagaimana mengelola peternakan secara baik, selain mengelola peternakan sapi perah pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga memberikan cara bagaimana hasil dari sapi perah tersebut diolah menjadi berbagai macam produk contohnya seperti dodol susu, permen susu, susu segar siap minum dan masih banyak lagi. Dalam tahap pelaksanaan Ini juga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga menyediakan Omah susu agar peternak sapi perah bisa langsung menjual hasil peternakannya kepada pengepul dari berbagai macam kota. Selain itu tahap pelaksanaan ini juga mengarahkan masyarakat Kampung Susu Lawu untuk merawat dan mengelola peternakan dengan baik.

Partisipasi Masyarakat dalam Tahap Evaluasi sangatlah penting karena masyarakan adalah penggerak program pemberdayaan masyarakat maka sudah seharusnya masyarakat dilibatkan dalam hal evaluasi program pemberdayaan yang bertujuan agar program pemberdayaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tapi juga diperlukan umpan balik tentang masalah dan kendala yang terjadi saat program pemberdayaan tersebut berlangsung serta mencari solusi atau pemecahan masalah dalam setiap permasalahan terkait program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan.

Untuk melakukan evaluasi maka perlu melewati beberapa tahapan evaluasi yaitu:

(1) Menetapkan apa yang harus dievaluasi
(2) Menyusun rencana evaluasi
(3) Pengumpulan data
(4) Analisis dan Presentasi data
(5) Pengambilan Keputusan.

Pada tahap evaluasi in masyarakat diberikan ruang untuk ikut berpartisipasi dalam mengevaluasi Program Pemberdayaan tersebut. Kita yang kita tahu bahwa partisipasi masyarakat adalah hal yang penting untuk berjalannya sebuah kebijakan maupun program-program yang dilakukan oleh pemerintah.

Efektivitas adalah pencapaian hasil yang sesuai dengan tujuan seperti yang telah ditetapkan, sehingga efektivitas menunjukan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kebijakan semakin mendekati sasaran, berarti mungkin tinggi efektivitasnya. Penilaian terhadap efektifivitas ditujukan untuk menjawab ketepatan waktu pencapaian hasil/ tujuan kebijakan. Efektivitas pada evaluasi kebijakan yang dimaksud yaitu pencapaian hasil dari program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah yang dilihat dari ketepatan waktu kesesuaian hasil dengan tujuan yang diinginkan. Peneliti berpendapat agar program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah dapat mencapai hasil yang efektif maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung sebagai kelengkapan dari pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah
2. Perlunya pemahaman masyarakat dan pihak pelaksana program pemberdayaan secara komprehensif baik konsepnya, penyusunannya maupun prakteknya di lapangan.

Efektifitas program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung susu Lawu sudah sangat efisien karena dengan adanya program pemberdayaan ini mampu membantu perekonomian masyarakat Kampung Susu Lawu dapat dilihat dari penjualan yang meningkat dari harga susu yang mulanya Rp. 5.200 per liter sekarang sudah meningkat menjadi Rp. 8.000 per liternya. Efektivitas program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di Kampung sudah berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat bagi peternak sapi perah. Selain itu para peternak juga sangat menyambut dengan baik saat program pemberdayaan itu dilaksanakan.

Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil Penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Peternakan sapi perah di Kampung Susu Lawu berdasarkan hasil penelitian di atas ternyata sudah efisien, karena kurang didukung dengan ketersediaan sumber daya dan yang memadai. Peneliti berpendapat bahwa untuk melaksanakan kegiatan apapun agar tercapai hasil yang diharapkan maka harus didukung dana yang memadai. Demikian pula halnya dalam penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat ini. Karena dana merupakan salah satu sumber daya yang harus ada dalam penerapan manajemen. Tanpa ada dukungan dana maka kebijakan tersebut tidak akan bisa berjalan optimal.

Selain itu efisiensi dari program pemberdayaan ini juga sudah sangat bagus disamping untuk membantu perekonomian pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan juga telah menyiapkan program KSL yang membantu untuk memberdayaakan para peternak sapi perah di Dusun Singolangu yang sekarang ini menjadi program unggulan atau prioritas Kabupaten Magetan, selain sapi perah yang menjadi salah satu program unggulan Kabupaten Magetan juga mempunyai 3 agro yang menjadi prioritas saat yaitu : (1) Agro Industri, (2) Agro Wisata, dan (3) Agro Bisnis. Dari situ bisa dilihat Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan Sangat Mengedepankan Program Pemberdayaan ini. Masyarakat Kampung Susu juga sangat berpartisipasi untuk memajukan dusunnya.

Program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini sudah dilakukan cukup adil dan merata sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat. Masyarakat yang mengikuti program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini juga mengatakan bahwa mendapatkan banyak fasilitas, modal, dan ilmu yang dimana kegiatan tersebut tidak hanya menguntungkan para peternak sapi perah namun juga menguntungkan semua lapisan masyarakat. Pemerataan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah di kampung susu lawu sudah sangat berhasil dan sangat sesuai dengan prosedur yang ada. Pemerataan ini memang ditujukan agar masyarakat yang tidak beternak sapi perah juga bisa merasakan imbas yang baik karena adanya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini dan khususnya agar peternak sapi perah di Kampung Susu Lawu ini bisa mengelola peternakan sapi perah dengan baik dan benar

Respon yang dikeluhkan oleh masyarakat dari program pemberdayaan ini adalah kelanjutan dari program pemberdayaan tersebut dan juga solusi mengurangi limbah yang sekarang menumpuk di Dusun Singolangu yang sampai sekarang belum diatasi dan mengganggu masyarakat sekitarnya. Dari respon masyarakat merupakan sebuah kesesuaian yang didapat dari lapangan dan berharap ada feedback atau umpan balik dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan dan langsung bisa diatasi ataupun di perbaiki secara baik.

Namun dari dari pihak Dinas juga sudah merespon keluhan dari mayarakat Kampung susu dengan cara mengagendakan pengembangan program pemberdayaan masyarakat untuk melanjutkan pembangunan KSL yang dilakukan pada tahun 2019 itu perencanaan lalu tahun 2020 pembangunan tahap 1 lalu pada tahun 2021 pembangunan tahap 2 atau finishing. Lalu mengawal dengan biaya operasional dana pembangunan KSL

berasal dari APBD Kab. Magetan, melakukan kajian dan koordinasi dengan dinas lain untuk mengembangkan titik kunjung wisata KSL lebih ke profesional dengan cara di branding, pelayanan yang memuaskan atau berstandart titik pariwisata selalu di akomodir. Selanjutnya disnakan kab. Magetan bekerjasama dengan pemerintah pusat untuk berusaha meningkatkan populasi sapi perah di kampung susu lawu dan populasi lahan hijau di kampung susu lawu.

Program pemberdayaan melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini dianggap sudah tepat karena didukung oleh potensi yang ada di dusun singolangu dan juga masyarakat singolangu sangat mendukung dan menerima program pemberdayaan masyarakat ini karena dulu yang berternak sapi penggemuk/potong yang notabennya 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali baru panen dan menjual ternaknya sekarang dengan sapi perah setiap hari mereka bisa mendapatkan pemasukan atau omset lebih dinamis termasuk masyarakat sekitar yang menerima susu segar dari singolangu ini di terima oleh pasar dan publik. Program pemberdayaan masyarakat ini sudah sangat tepat walaupun ada sedikit kendala yang belum bisa ditanggulangi oleh pihak Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten magetan namun mereka sudah sangat banyak merasakan hal - hal positif yang disebabkan oleh adanya pemberdayaan ini. Dengan begitu banyaknya potensi alam yang ada di Dusun Singolangu semakin memudahkan para peternak sapi perah untuk merawat ternaknya.

Dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini juga sudah tercapai dengan adanya fasilitas yang diberikan oleh pemerintah yang mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Dusun Singolangu yang selama ini masih banyak yang berprofesi menjadi petani atau pekebun sekarang sudah banyak beralih kebidang peternakan sapi perah karena masyarakat di penuhi permodalannya dan fasilitasnya oleh pemerintah sehingga masyarakat mampu bergerak secara mandiri dalam mengelola peternakannya. Program pemberdayaan ini sudah mumpuni mulai dari segi modal, fasilitas dan pembinaanya. Dalam kasus ini juga Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan membuat Koperasi Desa khusus untuk transaksi jual beli susu segar dan olahannya yang di olah oleh ibu – ibu PKK Dusun singolangu.

***Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pemberdayaan Masyarakat***

1. Faktor Penghambat Sebelum Adanya Program Pemberdayaan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah

   Banyak masalah atau kendala yang terjadi saat program pemberdayaan ini berlangsung salah satunya adalah karena tidak semua masyarakat Dusun Singolangu berprofesi sebagai peternak sapi perah banyak yang menolak adanya pemberdayaan masyarakat ini sehingga Masyarakat Dusun Singolangu masih terpecah belah antara Peternak sapi Penggemuk dengan peternak sapi perah karna disaping modal untuk sapi perah sendiri cukup mahal, maka pola pikir warga dusun singolangu masih sangat kurang mumpuni dan kurang adanya niat. Kemudian banyak Masyarakat masih takut untuk beranjak dari pekerjaan mereka yang penghasilannya masih sangat rendah dan juga Ada satu atau dua warga yang tidak memiliki kemampuan dan kemauan untuk beternak sapi perah jadi sebagai pionir yang menimbulkan sebagian masyarakat yang sudah ada niat menjadi ragu. Selain itu dilihat dari letak lokasi atau Geografis tanah yang dibutuhkan sangat terbatas dan juga menimbulkan pencemaran atau gangguan lingkungan solusinya membuat IPAL di sebelah Timur Kampung susu Lawu tetapi saat ini masih dikaji dan dicarikan dana.

2. Faktor Pendukung Setelah Adanya Program Pemberdayaan melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah

   Banyak juga faktor pendukung program pemberdayaan ini selain Sumberdaya yang sudah memadai dan cocok untuk beternak sapi perah banyak juga dinas di kabupaten magetan yang mendukung program pemberdayaan ini seperti Dompet Duafa, Bank Jatim kabupaten Magetan dan khususnya Pemkab Megetan Sendiri yang menjadikan Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu ini sebagai program unggulan kabupaten magetan dan juga setelah adanya program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan ini juga mengalami Peningkatan perekonomian masyarakat Kampung Susu Lawu meningkat pesat walaupun belum bisa dimasukkan dalam kategori pengetasan kemiskinan namun dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini sudah mampu mengurangi kemiskinan yang ada dan juga Membuka peluang usaha untuk semua masyarakat yang ada di kampung susu, dengan adanya pemberdayaan ini masyarakat kampung susu lebih berani untuk melangkah dan mencoba hal baru dalam dunia bisnis sehingga Kreatifitas dan juga kemampuan masyarakat Dusun

Singolangu meningkat pesat daripada sebelumnya hal ini dapat dilihat dari bagaimana masyarakat mengelola peternakan dan juga hasil peternakan yang ada sekarang Selain pengelolaan susu itu juga ada sayuran lalu tanaman hias, pengunjung dari luar selain menikmati olahan susu juga banyak yang membeli atau tertarik pada bunga dan sayur, sehingga yang tidak berprofesi sebagai peternak sapi masyarakat bisa menjual sayuran dan tanaman hias.

## Kesimpulan

1. Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan
   a. Sosialisasi.

      Sosialisasi yang dilakukan dengan memanfaatkan wadah yang ada seperti musyawarah dan pertemuan tingkat RT, RW, dan PKK merupakan sarana yang efektif mengingat dana operasional yang ada juga terbatas. Sehinga masyarakat miskin merasakan keterbukaan informasi hal itu berdampak adanya kesamaan pemahaman antar peternak sapi perah dengan pemerintah pelaksana program pemberdayaan masyarakat.

   b. Partisipasi Masyarakat

      Partisipasi masyarakat di Kampung Susu Lawu dapat dikatakan sudah cukup tinggi. Dapat dilihat dari masyarakat yang berperan aktif dalam rembug warga untuk menggali potensi / keterampilan apa yang dapat dikembangkan yang nantinya akan dimasukan kedalam musrenbang.

   c. Program Pemerintah

      Yang Harus Dilaksanakan Adanya program ini merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat dalam penanggulangan kemiskinan sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Kota Magetan dalam menjamin, menghormati, dan melindungi dalam pemenuhan hakhak dasar warga miskin.

   d. Program Pelatihan

      Yang Diberikan Sesuai Dengan Kapasitas dan Dapat Diterima Masyarakat Program pelatihan keterampilan ini sesuai dengan kapasitas masyarakat miskin karena kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut sesuai dari rekomendasi dari masyarakat miskin dan para peternak sapi perah. kegiatan

tersebut melihat potensi masyarakat miskin dan peternak sapi perah yang dapat dikembangkan.

e. Modal

Masyarakat yang sudah mendapat bekal keterampilan sering kali terkendala dengan masalah permodalan awal dalam membuka suatu usaha. Dalam pemenuhan kebutuhannya saja masyarakat dapat dikatakan masih terbatas sehingga masyarakat tidak jarang setelah pelaksanaan pelatihan berhenti karena terbatas dari segi permodalan.

f. Program Yang Dilaksanakan Tidak Berkelanjutan untuk membuat IPAL ini tidak Selesai dari jadwal yang telah direncanakan tidak ada keberlanjutan bagaimana masyarakat menanggulangi masalah limbah peternakan sapi perah. Jadi masyarakat malah terganggu dengan limbah yang dihasilkan karena tidak ada tindakan lanjut

2. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan

a. Efektivitas

Penanggulangan kemiskinan melalui program Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan menyatakan bahwa tujuan dari program ini sudah tercapai. Tercapainya tujuan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dapat diukur dengan warga miskin menjadi terentaskan dengan penurunan angka kemiskinan di Kampung Susu Lawu dari tahun 2018- sekarang. Selain penurunan angka kemiskinan, partisipasi masyarakat miskin dirasakan meningkat di Kampung Susu Lawu seperti dalam Musyawarah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang di adakan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan. Target sasaran program keterampilan merupakan masyarakat miskin yang sesuai dengan klasifikasi warga miskin Kampung Susu Lawu dan juga terfokus pada peternak sapi perah. Walaupun pada pelaksanaan sasaran program ini belum menyasar 100 % pada masyarakat miskin tetapi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan telah berusaha sesuai dengan database yang ada.

b. Efisiensi

Program pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan peternakan sapi perah ini sudah sangat efisien dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat selama program pemberdayaan masyarakat itu berlangsung, selain itu efiensi dari program ini dapat dilihat dari hasil pelaksanaan program yang memberikan sejuta manfaat untuk masyarakat Dusun Singolangu selain untuk peternak sapi perah manfaat itu juga dirasakan oleh banyak masyarakat lainnya.

c. Kecukupan

Perbaikan ekonomi masyarakat miskin sudah dapat dirasakan oleh warga miskin yang mengikuti Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Peternakan Sapi Perah di Kampung Susu Lawu Kel. Sarangan Kec. Plaosan Kab. Magetan belum maksimal. Program pelatihan ini belum dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat secara signifikan. Hanya segelintir masyarakat yang merasakan perbaikan ekonomi karena melanjutkan bekal pelatihan tersebut untuk membuka suatu usaha. Dari sisi lain seperti perubahan sikap, perilaku, dan pola pikir dengan program pelatihan keterampilan ini memberikan perubahan. Masyarakat lebih proaktif dalam mengakses programprogram penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin dari perilaku konsumtif berubah menjadi lebih produktif, dan dari pola pikir masyarakat tidak maju sudah mengarah pada lebih maju.

d. Pemerataan

Pendistribusian dana yang dilakukan pelaksana sudah merata dan wajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kampung Susu Lawu. Dana yang ada langsung ditransfer ke kelompok yang ikut dalam program pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari fasilitas yang diberikan masyarakat dikatakan sudah memadai. Hal itu dibuktikan dengan pembelian peralatan yang masih baru dan tempat pelaksanaan pelatihan yang memadai yang dilaksanakan di Kampung Susu Lawu."

e. Responsivitas

Program pelatihan keterampilan yang dilaksanakan di Kampung Susu Lawu sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan masyarakat dituangkan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan. Dengan demikian pelatihan keterampilan tersebut disesuaikan dengan potensi masyarakat peternak sapi perah. Potensi tersebut berdasarkan

musyawarah pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan sebelumnya selanjutnya naik ke tingkat kelurahan untuk menetapkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang akan dilaksanakan, sehingga dari kegiatan yang sudah ditetapkan pemerintah pelaksana akan memfasilitasi kegiatan tersebut."

f. Ketepatan

Pengaruh positif dari program berikut bisa dirasa dengan meluas. Bisa dirasa masyarakat memiliki motivasi menjadi peternak sapi perah meskipun masyarakat kerap terhalangi oleh modal. Masyarakat pun diajak guna berkreatifitas dengan bekal yang diterimanya untuk membuka suatu usaha dan menghilangkan pikiran bahwa yang mempunyai pendidikan tinggi secara formal biasanya dapat membuka usaha. peran ibu untuk anak-anaknya dirasakan berkurang karena mengalami kesibukan-kesibukan dalam meningkatkan pendapatan keluarganya.

***Saran***

1. Perlunya komitmen pemerintah dalam menindaklanjuti penanganan pembuangan limbah atau IPAL yang saat ini sangat di keluhkan oleh masyarakat sekitar. Selanjutnya, untuk keterampilan yang mulai jalan seperti permen susu, stik susu, dan dodol susu perlu diadakannya pelatihan mengenai penjualan hasil produksi ataupun memfasilitasi masyarakat dengan membuka stand penjualan pada saat ada acara Kantor Pemerintahan di Kota Magetan ataupun kerjasama pemerintah dengan usaha menengah dengan cara penitipan produk yang dihasilkan ke toko-toko yang ada di Kota Magetan dengan sistem bagi hasil dan memperluas pasar bagi masyarakat Dususn Singolangu.
2. "Mengajak masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke atas untuk berpartisipasi dalam peminjaman modal, dengan cara pembuatan aplikasi start-up investasi. Jadi, masyarakat menengah ke atas menginvestasikan sejumlah modal dengan nominal Rp 50.000,00 melalui aplikasi start-up tersebut dengan ketentuan bagi hasil seperti 25% bagi pemilik modal dan 75% bagi pelaku usaha. Selain itu, memaksimalkan staf-staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan untuk melaksanakan palatihan keterampilan dilaksanakan misalnya dua kali dalam setahun karena kebanyakan masyarakat penerima program pelatihan keterampilan tidak mempunyai bekal sama sekali. Disamping itu, memaksimalkan monitoring dan evaluasi SKPD sesudah program pelatihan dilaksanakan sampai dengan masyarakat miskin tersebut mendirikan suatu usaha dari bekal yang diterima. Didukung dengan

memaksimalkan peran pendamping seperti Perguruan Tinggi dan CSR dengan cara memberikan seminar ke masyarakat miskin ataupun memberi pelatihan pembukuan tentang laporan keuangan agar masyarakat mampu menghitung output dan income dari penjualan susu segar.

## Daftar Pustaka

Ambar Teguh Sulistyani. (2004). *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media Asep Saefuddin, dkk. (2003).

A. W. Widjaja. 2002. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Edi Suharto. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Eko, Sutoro. 2002. *Pemberdayaan Masyarakat Desa, Materi Diklat Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Samarinda.

Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo; Jakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, Cetakan pertama, Unit penerbitan dan percetakan akademi manajemen perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

Mubarak, Zaki, 2010, *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan,* Tesis, Semarang: Universitas Diponegoro.

Sedarmayanti, 2000, R*estrukturisasi dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*, Bandung; Penerbit Mandar Maju 427.

Sutrisno, D. (2005) "*Pemberdayaan Masyarakat dan Upaya Peningkatannya dalam Pengelolaan Jaringan Irigasi Mendut Kabupaten Semarang.*" Tugas Akhir tidak diterbitkan, Prorgam Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, Semarang.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.

Suharto, Edi. 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

Undang-undang No 57 tahun 2005 tentang desa.

Widjaja, HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media,2007), hlm 42.

Jurnal:

Munawar Noor (2011). P*emberdayaan Masyarakat Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial* Universitas Tujuh Belas Agustus Semarang. Jurnal Ilmiah CIVIS, Volume I, No 2, Juli 2011.

Website:

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/buku_tim/buku-tim-public-24.pdf

http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf

https://prasfapet.wordpress.com/2015/05/07/konsep-dan-teori-pemberdayaan-masyarakat/

© 2021 by the authors. This article is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution -ShareAlike 4.0 International (CC BY SA) license ( https ://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).